

BAB III

PELAKSANAAN KERJA MAGANG

3.1 Kedudukan dan Koordinasi

Praktek kerja magang dilaksanakan di PT Wahyu Abadi pada bagian *Accounting and Finance* sebagai *accounting staff*. PT Wahyu Abadi berdomisili di Kawasan Industri Silicon 1, Jalan Angsana Raya Blok L1-17, Lippo Cikarang, Sukaresi, Bekasi, Jawa Barat. Selama kerja magang berlangsung berada dalam pengawasan Ibu Desan selaku *accounting and finance manager* dan Bapak Yon Haryono sebagai pembimbing lapangan selama kerja magang berlangsung. Kerjasama dan komunikasi yang baik antar seluruh pegawai PT Wahyu Abadi membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan selama kerja magang ini.

3.2 Tugas yang Dilakukan

Tugas-tugas yang dilakukan selama kerja magang adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Rekap SPT Masa PPh Pasal 23 dari *E-Bupot*

PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 ini dibayarkan ataupun terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Tujuan melakukan rekap SPT PPh Pasal 23 ini adalah untuk dokumentasi dan mempermudah perusahaan mempersiapkan data-data jika sewaktu-waktu terjadi pemeriksaan. Dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan rekap SPT Masa PPh Pasal 23 adalah SPT Masa PPh Pasal 23, bukti potong PPh pasal 23, Bukti Pembayaran, dan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), lalu *di-input* ke dalam *Microsoft Excel*. Langkah-langkah dalam membuat rekap PPh Pasal 23 sebagai berikut:

1. Mendapat *softcopy* format rekap PPh Pasal 23, *softcopy* rekap bukti potong PPh Pasal 23, SPT Masa PPh Pasal 23, Bukti Potong PPh Pasal 23, Bukti Penerimaan Elektronik dan Bukti Pembayaran.
2. Membuka *website* www.ebupotpajak.go.id kemudian melakukan *login* dengan NPWP dan *Password* perusahaan.
3. *Klik* “Bukti Pemoongan” yang terdapat di atas halaman utama *website* tersebut, kemudian pilih “Pasal 23” dan *klik* “daftar bukti potong”.
4. Pertama, merekap data bukti potong yang terdiri beberapa kolom yaitu, masa SPT, NPWP, nama, nomor bukti potong, tanggal bukti potong, nilai objek pajak (DPP), PPh yang dipotong, kode pajak, kode objek pajak, dan nomor dokumen ke dalam *Microsoft Excel*. Dokumen yang digunakan adalah daftar bukti potong.
5. Selanjutnya merekap dan mengisi kolom Masa Pajak, DPP Deviden, PPh 23 Deviden, DPP Bunga, PPh 23 Bunga, DPP Sewa dan Penghasilan Lain, PPh

23 Sewa dan Penghasilan Lain, DPP Jasa, PPh 23 Jasa, DPP dan PPh 23 yang telah dijumlahkan masing-masing, Jumlah Pembayaran, Kode Pajak, Tanggal Pembayaran, Nomor NTPN, Tanggal lapor, dan Nomor bukti penerimaan. Data” tersebut terdapat dalam *file* “Perekaman Bukti Penyetoran dan *file Dashboard*” yang berisi data bukti penerimaan elektronik, Bukti Pembayaran, dan SPT induk PPh 23.

6. Menyimpan dan menyerahkan hasil rekapan PPh 23 yang telah dibuat kepada pembimbing lapangan untuk diperiksa kembali.

2. Meng-*input* Bukti Potong PPh Pasal 23 Kedalam *E-Bupot*

PPh Pasal 23 tidak terlepas dari bukti pemotongan, dan bukti potong sangat dibutuhkan sebagai tanda bahwa pemotong maupun pihak yang dipotong pajak penghasilannya telah memenuhi kewajibannya dengan melampirkan bukti potong yang sah, dan bukti potong berfungsi untuk memenuhi syarat saat menyampaikan SPT Tahunan PPh. Tujuan dilakukan input bukti potong PPh 23 adalah untuk mengontrol apakah hutang PPh 23 sudah dilaporkan atau belum, dan bertujuan agar data tersimpan dalam *website E-Bupot*. Dokumen yang dibutuhkan adalah *General Ledger* atau rekapan data yang telah dibuat oleh perusahaan, dan daftar keterangan perusahaan *vendor/customer*. Kemudian diinput ke dalam *E-Bupot*. Langkah-langkah dalam menginput bukti potong PPh 23 sebagai berikut:

1. Menerima *file General Ledger* atau rekapan data yang telah dibuat perusahaan dan daftar keterangan vendor dari pembimbing lapangan.

2. Membuka *website* www.ebupotpajak.go.id kemudian melakukan *login* dengan NPWP dan *Password* perusahaan.
3. *Klik* “Bukti Pemotongan” yang terdapat di atas halaman utama *website* tersebut
4. Kemudian pilih “Pasal 23” dan “*Input* Bukti Potong 23”
5. Selanjutnya mengisi data-data yang diperlukan untuk meng-*input* bukti potong baru. Dalam mengisi data-data bukti potong terbagi menjadi beberapa bagian, pertama adalah kolom mengenai identitas wajib pajak yang dipotong (yang berisikan tahun pajak, masa pajak, identitas dapat berupa NIK atau NPWP, Nama Wajib Pajak, alamat) dan data tersebut dapat didapat dari daftar keterangan *vendor*. Kedua adalah dasar pemotongan (yang berisikan nama dokumen, nomor dokumen dan tanggal dokumen), ketiga adalah pajak penghasilan yang dipotong (yang berisikan kode objek pajak, jumlah penghasilan bruto, tarif, PPh yang dipotong), dan terakhir yaitu identitas pemotong pajak (yang berisikan NPWP pemotong pajak, nama pemotong pajak, dan kolom nama dan jabatan orang yang bertandatangan atas data-data yang diisi).
6. *Klik* tanda “√ “ untuk menyetujui bahwa data yang di-*input* sudah benar, jelas dan lengkap. Kemudian “simpan” agar data data yang telah diisi dapat tersimpan, dan secara langsung bukti potong yang telah di-*input* akan muncul dalam daftar bukti potong PPh pasal 23 di *E-Bupot*.

3. Melakukan Rekap SPT Masa PPh Pasal 21

PPh Masa Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, bonus, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai atau orang pribadi. Tujuan melakukan rekap SPT Masa PPh Pasal 21 untuk mengecek kesesuaian antara jumlah PPh 21 yang dipotong dengan yang dibayarkan. Dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan rekap SPT Masa PPh Pasal 21 adalah SPT Masa PPh 21 milik perusahaan yang telah dibuat, Bukti Pembayaran dan Bukti Penerimaan Elektronik. Kemudian di-*input* kedalam *Microsoft Excel*. Langkah-langkah yang dilakukan untuk merekap PPh 21 adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh dokumen berupa *softcopy* SPT Masa PPh 21, Bukti Penerimaan Elektronik, Bukti Pembayaran, dan format tabel untuk merekap PPh 21. Dalam format rekap PPh 21 terdapat tabel yang terdiri dari kolom Masa Pajak, Objek Pajak yang berisikan (DPP Pegawai tetap, PPh 21 Pegawai tetap, DPP Pegawai tidak tetap, PPh 21 Pegawai tidak tetap, DPP Komisaris, PPh 21 Komisaris, DPP Bukan Pegawai, PPh 21 Bukan Pegawai), Objek Pajak Final yang berisikan (DPP pesangon, dan PPh 21 Pesangon), Total dari DPP dan PPh 21, PPh 21 yang dibayarkan, Kode pajak, Tanggal Pembayaran, Nomor NTPN, Tanggal Pelaporan dan Nomor Bukti Penerimaan.

2. Mengisi sesuai dengan tabel format rekapan yang diberikan berdasarkan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang telah diberikan (SPT PPh 21, Bukti Penerimaan Elektronik, dan Bukti Pembayaran).
3. Menyimpan dan menyerahkan hasil rekapan PPh 21 yang telah dibuat kepada pembimbing lapangan untuk diperiksa kembali.

4 Melakukan Rekap SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)

PPh Masa Pasal 4 ayat (2) merupakan pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak badan maupun orang pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang diperoleh dan pemotongnya bersifat final. Tujuan melakukan rekap SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) untuk memverifikasi jumlah PPh yang berada di bukti potong dengan jumlah yang terdapat dalam SPT PPh 4 ayat (2) jumlahnya sama. Dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan rekap SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) adalah SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) milik perusahaan, Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat (2), Bukti Pembayaran, dan Bukti Penerimaan Elektronik. Kemudian diinput ke dalam *Microsoft Excel*. Langkah-langkah yang dilakukan untuk merekap PPh Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh dokumen berupa SPT Pasal 4 ayat (2) milik perusahaan beserta dengan Bukti Penerimaan Elektronik, Bukti Pembayaran, Bukti Potong, *softcopy* format tabel rekapan bukti potong PPh 4 ayat (2) dan *softcopy* format tabel rekapan PPh Pasal 4 ayat (2).

2. Pertama merekap bukti potong PPh 4 ayat (2) dengan mengisi format tabel rekapan bukti potong PPh 4 ayat (2) yang telah diberikan. Untuk mengisi tabel tersebut dokumen yang dibutuhkan adalah daftar bukti potong PPh 4 ayat (2).
3. Mengisi format tabel rekapan pajak tersebut berdasarkan dokumen yang telah diberikan (SPT PPh 4 ayat (2), Bukti Penerimaan Elektronik, dan Bukti Pembayaran)
4. Menyimpan dan menyerahkan hasil rekapan PPh Pasal 4 ayat (2) yang telah dibuat kepada Pembimbing Lapangan untuk diperiksa kembali.

5. Menjurnal dan Memberikan Kode Akun dalam Nota Bukti Pengeluaran Kas

Menjurnal dan memberikan kode akun merupakan kegiatan yang penting untuk mengklasifikasikan jenis transaksi agar dapat di periksa dengan mudah dan sesuai dengan kategori yang diinginkan perusahaan. Tujuan dilakukannya jurnal dan pemberian kode akun adalah untuk mengetahui suatu jenis transaksi termasuk ke dalam akun yang mana, sehingga meminimalisir kesalahan penempatan atau pengelompokan jenis transaksi tersebut. Dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan jurnal dan pemberian kode akun adalah *Voucher* pengeluaran atau nota pengeluaran kas dan bukti pembelian. Langkah-langkah untuk menjurnal dan memberikan kode akun adalah sebagai berikut:

1. Menerima *voucher* pengeluaran dari *purchasing department*
2. Melakukan pengecekan terhadap jumlah yang tertera dalam *voucher* pengeluaran dengan bukti-bukti pembelian apakah nilainya sudah sesuai atau tidak

3. Setelah melakukan pengecekan dan perhitungan kembali, dilakukannya pemberian kode akun dan jurnal nama akun sesuai dengan jenis transaksi yang dilakukan.
4. Setelah memberikan jurnal dan kode akun, kemudian dokumen tersebut di berikan kepada pembimbing lapangan untuk ditandatangani.

6. Merekap Pertanggungjawaban Uang Muka Vendor PT S

Pertanggungjawaban uang muka dilakukan oleh pemegang uang muka dengan menyusun laporan pertanggungjawaban uang muka. Tujuan dilakukannya rekap pertanggungjawaban uang muka adalah untuk mengetahui dan menghitung perbandingan antara jumlah dana/uang muka yang dibayarkan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pembelian tersebut. Apakah jumlah uang muka dan biaya yang dikeluarkan sama, uang muka yang dibayarkan jumlahnya lebih kecil dari biaya yang seharusnya (kurang bayar), atau uang muka yang dibayarkan jumlahnya lebih besar dari biaya yang seharusnya (lebih bayar). Dokumen yang dibutuhkan untuk merekap adalah kwitansi-kwitansi pertanggungjawaban bon sementara atas uang muka. Langkah-langkah yang dilakukan untuk merekap pertanggungjawaban uang muka adalah:

1. Menerima dokumen yaitu, kuitansi-kuitansi bon pertanggungjawaban sementara, dan *softcopy* format rekap pertanggungjawaban uang muka.
2. Dalam *softcopy* format rekap terdapat kolom (No.*Purchase Order*, Nominal uang muka yang dibayarkan, No.*invoice*, Jumlah Pertanggungjawaban Uang Muka (PJUM), Tanggal, dan Keterangan). Kolom-kolom tersebut diisi

berdasarkan dokumen kuitansi-kuitansi pertanggungjawaban bon sementara atas uang muka.

3. Setelah melakukan rekap pertanggungjawaban uang muka, hasil rekapan kemudian diberikan kepada pembimbing lapangan untuk diperiksa kembali.

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang

3.3.1 Proses Pelaksanaan

Proses pelaksanaan kerja magang berlangsung dari tanggal 1 Juli 2020 hingga tanggal 2 September 2020. Rincian tugas yang dilakukan adalah sebagai berikut:

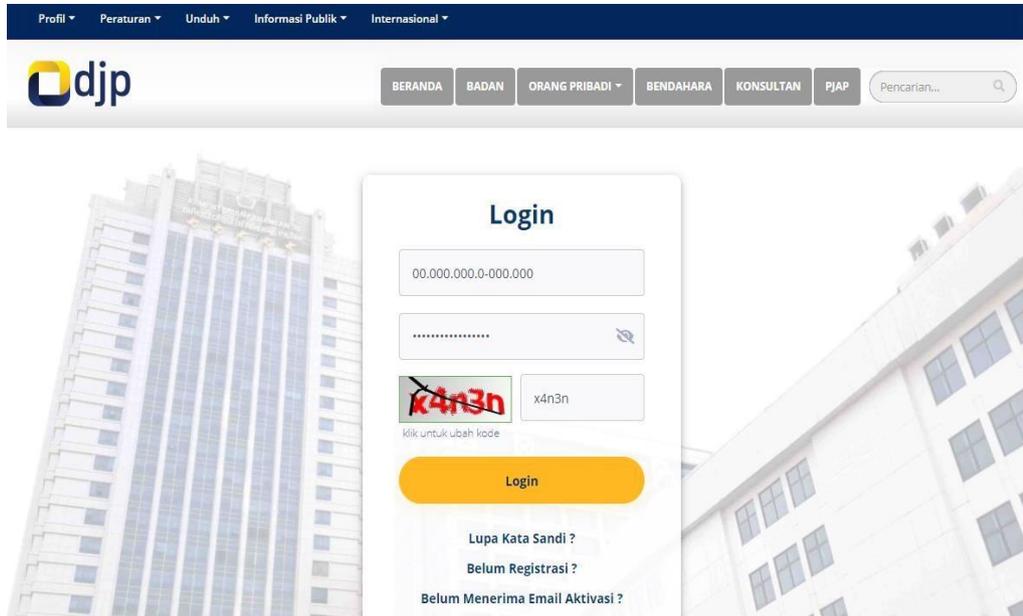
1. Melakukan Rekap SPT Masa PPh Pasal 23 dari *E-Bupot*

Rekapan PPh Pasal 23 PT Wahyu Abadi dilakukan untuk periode Juli-Desember tahun 2018, periode Januari-Desember tahun 2019, dan periode Januari- Agustus tahun 2020. Tidak hanya merekap SPT PPh Pasal 23, melainkan juga melakukan rekap bukti potong PPh Pasal 23. Pada periode tahun 2018 merekap sebanyak 512 bukti potong, periode tahun 2019 merekap sebanyak 282 bukti potong, dan periode tahun 2020 sebanyak 208 bukti potong. Langkah-langkah dalam merekap PPh Pasal 23 dan bukti potong PPh Pasal 23 dari *website E-Bupot* adalah sebagai berikut:

1. Sebelum merekap bukti potong PPh Pasal 23, Pembimbing Lapangan telah memberikan *softcopy* format rekapan bukti potong PPh Pasal 23. Gambar berikut merupakan contoh format rekapan bukti potong PPh Pasal 23.

Gambar 3.2

Tampilan Login kedalam Website E-Bupot



(Sumber: www.ebupotpajak.go.id)

3. Setelah masuk ke dalam *website E-Bupot* milik perusahaan, kemudian pilih “Bukti Pemotongan” – “Pasal 23” – “Daftar Bukti Potong 23” untuk mendapatkan informasi data terkait dengan bukti potong PPh 23.

Gambar 3.3

Cara Membuka Daftar Bukti Potong



(Sumber: Website E-Bupot)

Setelah pilih “Daftar Bukti Potong” seperti yang dicontohkan dalam (Gambar 3.2), maka akan muncul Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23.

Gambar 3.4

Contoh Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 FORM 1724 - III

H.1 NOMOR 3300000022

H.2 Pembetulan Ke- _____ H.3 Pembatalan

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG

A.1 NPWP : ██████████

A.2 NIK : ██████████

A.3 Nama : MAXINDO NETWORK

A.4 Alamat : JL. MAKINA KAYA HKC BUKIT GOLF MEDITERANIA PIK
Kelurahan/Desa : KAMAL MUARA Kecamatan : PENJARINGAN
Kota/Kabupaten : KOTA ADM. JAKARTA Provinsi : DKI JAKARTA Kode Pos : 14470

A.5 No. Telepon : _____

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
1-2020	24-104-26	6.500.000,00	0	2	130.000,00

B.7 Dokumen Referensi: Nama Dokumen Bukti Pembebasan
Nomor Dokumen BPVCMB1/20011014 Tanggal 10-01-2020

B.8 PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan surat keterangan Bebas(SKB). Pembebasan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Nomor : _____ Tanggal : _____

B.9 PPh Pasal 23 ditanggung oleh Pemerintah(DTP) berdasarkan : _____
 SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN : _____

C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

C.1 NPWP : 013171145007000

C.2 Nama Wajib Pajak : WAHYU ABADI

C.3 Tanggal : 20-02-2020

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan)

Gambar 3.4 merupakan contoh daftar bukti potong yang telah diinput ke dalam E-Bupot. Pada Gambar 3.4 terdapat beberapa informasi yang digunakan untuk mengisi kolom pada format rekapan bukti potong PPh Pasal 23 yaitu, Masa SPT yaitu masa “Januari”, NPWP yang terdapat dalam kotak berwarna hitam, Nama Perusahaan dalam kotak berwarna kuning yaitu “Maxindo Network”, Nomor

Bukti Potong terdapat dalam kotak berwarna hijau yaitu “330000022”, Tanggal Bukti Potong terdapat dalam kotak berwarna pink yaitu tanggal “10/01/2020”, Nilai Objek Pajak terdapat dalam kotak berwarna ungu yaitu sebesar “6.500.000”, PPh Yang Dipotong dalam kotak berwarna coklat sebesar “130.000”, Kode Objek Pajak dalam kotak berwarna biru muda yaitu “24-104-26” dan Nomor Dokumen dalam kotak berwarna biru tua yang terdapat pada kolom B.7 “Dokumen referensi”. Dalam kolom Kode Pajak diisi dengan angka “411124/104” angka tersebut sesuai dengan kode perusahaan dan diikuti dengan kode objek pajak Setelah mendapatkan data-data tersebut, selanjutnya melakukan rekap ke dalam *Microsoft Excel*. Hasil akhir dari contoh pengisian rekapan bukti potong PPh Pasal 23 PT Wahyu Abadi untuk masa Januari 2020 adalah sebagai berikut:

Gabar 3.5

**Hasil Akhir Pengisian Rekapan Bukti Potong PPh Pasal 23 PT Wahyu Abadi
Masa Januari 2020**

MASA	NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		NILAI OBJEK PAJAK (Rp)	PPh YANG DIPOTONG (Rp)	KODE PAJAK	KODE OBJEK PAJAK	NOMOR DOKUMEN
				NOMOR	TANGGAL					
JANUARI	1		WAHANA CIPTA GEMILANG	3300000026	17/01/2020	62.000.000	1.240.000	411124/104	24-104-01	BP/MBAL/20011706-31
	2		TRUJAYA WIDYAKSANA SENTOSA	3300000025	17/01/2020	3.820.000	76.400	411124/104	24-104-29	BP/CM81/20011713-02
	3		SUN STAR PRIMA MOTOR	3300000024	17/01/2020	866.250	17.325	411124/104	24-104-29	CP/KBP1-CMB1/20011701-05
	4		PT WIDYAKSANA SENTOSA	3300000023	17/01/2020	9.000.000	180.000	411124/104	24-104-29	BP/MBAL/20011705-10-01
	5		MAXINDO NETWORK	3300000022	10/01/2020	6.500.000	130.000	411124/104	24-104-26	BP/CM81/20011014
	6		MANEFA USA INDONESIA	3300000021	27/01/2020	350.000	7.000	411124/104	24-104-29	CP/KBP1-FURCH/20011701-01
	7		JOBSTREET INDONESIA	3300000020	10/01/2020	7.370.000	147.400	411124/104	24-104-34	BP/CM81/20011015
	8		ANBO	3300000019	31/01/2020	2.985.000	59.700	411124/104	24-104-30	BP/CM81/20011013
	9		JANETRA MULTI SARANA	3300000018	10/01/2020	95.460.000	1.909.000	411124/104	24-104-56	BP/CM81/20011016
	10		INTER MOTOR SPORT	3300000017	31/01/2020	5.563.636	111.272	411124/104	24-104-30	BP/CM81/20011015
	11		HEIDELBERG INDONESIA	3300000016	31/01/2020	59.250.000	1.185.000	411124/104	24-104-29	BP/MBAL/20011301-01
	12		GLOBAL MANDIRI INSTRUMENTASI	3300000015	09/01/2020	300.000	6.000	411124/104	24-104-29	CP/KBP1-FURCH/20010901-02
	13		FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL	3300000014	10/01/2020	16.126.613	324.731	411124/104	24-104-40	BP/CM81/20011009-02
	14		ETOS INDONESIA	3300000013	31/01/2020	7.000.000	140.000	411124/104	24-104-35	BP/MBAL/20011302-03
	15		KRISWIDYANTORO	3300000012	31/01/2020	13.195.000	263.900	411124/104	24-104-54	BP/MBAL/20011302-02
	16		DASA PRIMA	3300000011	24/01/2020	108.327.900	2.166.558	411124/104	24-104-54	BP/MBAL/20012401-12
	17		CALTESTS INDONESIA	3300000010	07/01/2020	1.375.000	27.500	411124/104	24-104-29	CP/KBP1-MBA1/20010701-05
	18		CAHAYA BARU MULIA	3300000009	31/01/2020	98.400.000	1.968.000	411124/104	24-104-54	BP/MBAL/20011301-10
	19		BIROTIKA SEMESTA	3300000008	10/01/2020	1.169.496	23.389	411124/104	24-104-56	BP/CM81/20011010
	20		BABINDO MEDIATAMA	3300000007	24/01/2020	5.000.000	100.000	411124/104	24-104-25	BP/CM81/20011401
	21		AGUNG RAYA	3300000006	31/01/2020	29.584.660	591.693	411124/104	24-104-56	BP/CM81/20011302-01
	22		SDEBISOND	3300000005	31/01/2020	20.000.000	3.000.000	411124/102	24-102-01	J/20011301
	23		BUANA CITRA ABADI	3300000004	10/01/2020	750.000	15.000	411124/100	24-100-02	BP/CM81/20011013
	24		BUANA CITRA ABADI	3300000003	10/01/2020	750.000	15.000	411124/100	24-100-01	BP/CM81/20011003-16
	25		TUNAS FUNDIBUMI	3300000002	17/01/2020	15.539.677	310.793	411124/104	24-104-02	BP/CM81/20011703-02
	26		TIRTASARI NIRMALA	3300000001	17/01/2020	3.543.636	70.869	411124/104	24-104-16	BP/CM81/20011703-01
TOTAL						574.936.711	14.422.131			

(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Pada Gambar 3.5, Seluruh kolom untuk masa Januari tahun 2020 telah terisi dengan informasi-informasi yang diperoleh dari Bukti Potong PPh pasal 23 dalam *website E-Bupot*. Setelah merekap bukti potong masing-masing masa pajak, pada kolom total yang berada pada Gambar 3.5 ini berisikan total nilai objek pajak atau DPP PPh 23 yang terutang dan total nilai PPh 23 yang akan dipotong. dan nilai tersebut harus sesuai dengan jumlah yang disetor nantinya. Pengisian serupa juga dilakukan untuk Masa dan Periode Tahun Pajak 2018, dan 2019.

4. Setelah merekap bukti potong PPh Pasal 23, yang dilakukan berikutnya adalah merekap PPh Pasal 23. Berikut adalah Gambar format rekapan PPh Pasal 23 PT Wahyu Abadi.

Gambar 3.6

Format Rekapan PPh Pasal 23 PT Wahyu Abadi

MASA	DEVIDEN		BUNGA		ROYALTI		SEWA & PENGHASILAN LAIN		JASA		TOTAL		JUMLAH BAYAR	KODE PAJAK	TANGGAL BAYAR	NO. NTPN	TANGGAL TERIMA	NOMOR BUKTI TERIMA
	BRUTO	PPH	BRUTO	PPH	BRUTO	PPH	BRUTO	PPH	BRUTO	PPH	BRUTO	PPH						

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan)

Gambar 3.6 merupakan contoh format rekapan PPh Pasal 23 PT Wahyu Abadi. Dalam format tersebut terdapat beberapa kolom yang harus diisi, yaitu Masa SPT, DPP masing-masing jenis pajak yang akan dipotong (Deviden, Bunga, Royalti, Sewa dan Penghasilan lain, dan Jasa), PPh terutang masing-masing jenis pajak yang akan dipotong, Total DPP dari setiap jenis pajak, Total PPh yang

terutang, Jumlah yang dibayarkan, Kode Pajak, Tanggal Pembayaran, No. NTPN, Tanggal Penerimaan, dan Nomor Bukti Penerimaan.

5. Klik File “Dashboard” pada kiri atas halaman *website*, kemudian terdapat daftar SPT yang telah terkirim. Agar memudahkan untuk pencarian maka dapat dicari berdasarkan periode tahun pajak dan masa pajak yang diinginkan. Contoh: “Tahun = 2020, Masa Pajak = 1”. Untuk mengisi kolom DPP dan PPh yang terutang masing-masing jenis pajak, dilihat dari SPT induk PPh Pasal 23. Berikut adalah Gambar SPT induk PPh Pasal 23 Masa Januari 2020 PT Wahyu Abadi.

Gambar 3.7

SPT Induk PPh 23 Masa Januari 2020 PT Wahyu Abadi

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26		FORMULIR 1724 INDUK	
Masa Pajak (mm-yyyy) H.1 01 - 2020		Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini		area barcode	
H.2 <input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal		H.3 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke-		Jumlah Lembar SPT termasuk LAMPIRAN: (Diisi oleh petugas) 0 H.5	
A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK					
A.1 NPWP	[REDACTED]				
A.2 NAMA	WAHYU ABADI				
A.3 ALAMAT	KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG JL PULO AYANG RAYA, JATINEGARA, CAKUNG, KOTA ADM.				
A.4 NO. TELEPON	021-4610072		A.5 EMAIL : ptwahyuabadi.pajak@wahyuabadi.co.id		
B. OBJEK PAJAK					
NO	URAIAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Pb.)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/ DTP (Pp.)	
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	
1. PPh PASAL 23					
1	DIVIDEN	24-101-01	0,00	0,00	
2	BUNGA	24-102-01	20.000.000,00	3.000.000,00	
3	ROYALTI	24-103-01	0,00	0,00	
4	HADIAH, PENGHARGAAN, BOKUS DAN LAINNYA	24-100-01	0,00	0,00	
5	SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA	24-100-02	1.500.000,00	30.000,00	
6. JASA					
6a. JASA TEKNIK		24-104-01	62.000.000,00	1.240.000,00	
6b. JASA MANAJEMEN		24-104-02	15.539.677,00	310.793,00	
6c. JASA KONSULTAN		24-104-03	0,00	0,00	
6d. JASA LAIN SELAIN JASA YANG TELAH DIPOTONG PPh PASAL 23			475.887.084,00	9.841.339,00	
7	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D 6)		574.926.761,00	14.422.132,00	
8	JUMLAH PPh PASAL 23 YANG KURANG DIBETOR SETELAH DIKURANGI PPh PASAL 23 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)			14.422.132,00	
9	JUMLAH PPh PASAL 23 YANG KURANG DIBETOR SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN DAN PEMBETULAN SLIKTI PEMOTONGAN			0,00	

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan)

Gambar 3.7 merupakan contoh SPT Induk PPh Pasal 23 PT Wahyu Abadi masa Januari 2020. Dari SPT tersebut dapat mengisi kolom nilai DPP dan PPh yang

terutang untuk masing-masing jenis pajak PPh Pasal 23. Sebagai contoh, pada kolom yang dikotak merah merupakan nilai DPP dari jenis pajak PPh Pasal 23 yang bersumber dari bunga yaitu sebesar “20.000.000”, dan merupakan nilai PPh yang terutang sebesar “3.000.000” dari jenis pajak PPh Pasal 23 yang bersumber dari bunga. Kemudian dalam kotak berwarna ungu merupakan nilai dari DPP dan PPh yang terutang yang bersumber dari Sewa dan Penghasilan lain sebesar “1.500.000” dan “30.000”. Pada kotak berwarna hitam merupakan nilai DPP dan PPh terutang dari semua jenis jasa. Dan dalam kotak berwarna kuning merupakan total dari semua DPP “574.926.761” dan PPh yang terutang Pasal 23 sebesar “14.422.132”. Nilai total DPP dan PPh yang terutang dalam SPT induk harus sama besar dengan total nilai DPP dan PPh yang terutang dari hasil rekapan bukti potong yang sebelumnya sudah terekap, karena jika nilai DPP dan PPh yang terutang jumlahnya sama, antara yang terdapat dalam SPT Induk dan Bukti Pematangan, maka PPh yang terutang jumlahnya benar.

Gambar 3.8

Hasil Sebagian Rekapan PPh 23 Masa Januari 2020

MASA	DEVIDEN		BUNGA		ROYALTY		SEWA & PENGHASILAN LAIN		JASA		TOTAL	
	BRUTO	PPH	BRUTO	PPH	BRUTO	PPH	BRUTO	PPH	BRUTO	PPH	BRUTO	PPH
JANUARI			20.000.000	3.000.000			1.500.000	30.000			553.426.761	11.392.132
											553.426.761	11.392.132

(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Gambar 3.8 merupakan hasil sebagian rekapan PPh 23 Masa Januari 2020. Nilai kolom-kolom tersebut diisi berdasarkan data dari SPT induk PPh Pasal 23. Hasil rekapan tersebut belum selesai secara keseluruhan, karena masih terdapat kolom Jumlah Bayar, Kode Pajak, Tanggal Pembayaran, No. NTPN, Tanggal Penerimaan dan Bukti Nomor Penerimaan.

6. Untuk mengisi kolom Jumlah Bayar, Kode Pajak, Tanggal Pembayaran, No. NTPN dimulai dengan *klik File* “SPT Masa PPh” >> “Perekaman Bukti Penyetoran” dan cari kata kunci berdasarkan Tahun Pajak dan Masa Pajak yang diinginkan. Contoh: 2020- 1 (untuk mencari data terkait Masa SPT yang diinginkan). Gambar berikut merupakan Gambar Bukti Penyetoran/ Pembayaran.

Gambar 3.9

Bukti Penyetoran/ Pembayaran

Panel Perekaman Bukti Penyetoran

input Bukti Setor

records

No	Nomor Bukti	Jenis Pajak	Jenis Setoran	Tahun	Masa	Jumlah (Rp)	Tanggal Setor	Aksi
1	D6C5F741GTKE4RDN	411124-PPh Pasal 23	100-Masa	2020	0101	30.000	07-02-2020	Hapus
2	14B00741GTKFCRMI	411124-PPh Pasal 23	102-Bunga	2020	0101	3.000.000	07-02-2020	Hapus
3	5DE1000LI91F5ED8	411124-PPh Pasal 23	104-Jasa	2020	0101	11.392.132	07-02-2020	Hapus

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan)

Dalam Gambar 3.9 terdapat 3 (tiga) jenis setoran pajak yang berbeda, dan masing-masing memiliki No. NTPN, dan kode pajak yang berbeda. Contoh: untuk jenis setoran bunga memiliki kode pajak “102” dan No.NTPN “14B00741GTKFCRMI” berbeda dengan jenis setoran untuk jasa yang memiliki kode pajak “104” dan No.NTPN “5DE1000LI91F5ED8. Pada kotak berwarna ungu merupakan data untuk mengisi kolom jumlah PPh Pasal 23 yang dibayarkan atau disetor yaitu sebesar “Rp.30.000” untuk jenis setoran masa,

“Rp.3.000.000” untuk jenis setoran bunga, dan “Rp.11.392.132” untuk jenis setoran jasa, dan kotak yang berwarna kuning merupakan data untuk mengisi tanggal setor/pembayaran yaitu tanggal “07/02/2020”. Jumlah PPh 23 yang disetor sebesar Rp.14.422.132 dan jumlahnya sama dengan besarnya PPh yang dipotong atau terutang dalam rekapan Bukti Potong, maka dapat disimpulkan bahwa perhitungan untuk PPh Pasal 23 sudah dilakukan dengan benar.

- Untuk mengisi kolom tanggal pelaporan, dan nomor bukti penerimaan, membutuhkan dokumen Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Untuk membuka *file* tersebut langkah yang dilakukan adalah *klik* “*Dashboard*” pada kiri atas *website* >> pilih BPE sesuai dengan masa yang diinginkan. Berikut merupakan gambar Bukti Penerimaan Elektronik masa Januari 2020 untuk SPT PPh Pasal 23 PT Wahyu Abadi.

Gambar 3.10

Bukti Penerimaan Elektronik Masa Januari 2020 SPT PPh 23 PT Wahyu Abadi

		KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 email : pengaduan@pajak.go.id ; informasi@pajak.go.id	
BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)			
		NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 04145207105201205016	
NPWP	013171143007000		QR CODE  MJIH
Nama	: WAHYU ABADI		
Jenis Pajak	: PPH2326		
Pembetulan Ke-	0		
Tanggal Terima	: 20-02-2020		
Tahun Pajak	: 2020		
Masa Pajak	: 1		

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan)

Pada Gambar 3.10 merupakan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) Masa Januari untuk PPh Pasal 23 milik PT Wahyu Abadi. Dalam dokumen tersebut dapat mengisi kolom Tanggal penerimaan dan Nomor Bukti Penerimaan untuk melengkapi rekapan PPh Pasal 23. Pada kotak berwarna hijau merupakan data untuk mengisi Tanggal Penerimaan yaitu tanggal “20/02/2020”, dan pada kotak berwarna hitam merupakan data untuk mengisi Nomor Bukti Penerimaan yaitu “0414520710520120516”. Gambar berikut merupakan hasil rekapan lanjutan PPh Pasal 23 Masa Januari PT Wahyu Abadi.

Gambar 3.11

Hasil Rekapan Lanjutan PPh 23 Masa Januari 2020 PT Wahyu Abadi

JUMLAH BAYAR	KODE PAJAK	TANGGAL BAYAR	NO. NTPN	TANGGAL TERIMA	NOMOR BUKTI TERIMA
3.000.000	411124/102	07/02/2020	14B00741GTKFCRMI	20/02/2020	04145207105201205016
30.000	411124/100	07/02/2020	D6C5F741GTKE4RDN	20/02/2020	04145207105201205016
11.392.132	411124/104	07/02/2020	5DE1000L191F5ED8	20/02/2020	04145207105201205016

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan)

Gambar 3.11 merupakan hasil rekapan lanjutan dari hasil rekapan sebagian sebelumnya, maka dari itu Rekapan PPh Pasal 23 sudah selesai. Pengisian serupa dilakukan untuk masa-masa pajak lain dan tahun pajak 2018, dan 2019. Secara keseluruhan merekap SPT PPh Pasal 23 untuk periode tahun pajak 2018, 2019, dan 2020 sampai masa Juni.

2. Meng-input Bukti Potong PPh Pasal 23 Kedalam E-Bupot

Penginputan Bukti Potong PPh Pasal 23 PT Wahyu Abadi ke dalam *E-Bupot* untuk masa Juli dan Agustus 2020. Langkah-langkah untuk meng-input bukti potong PPh Pasal 23 sebagai berikut:

1. Membuka *Website* www.ebupotpajak.go.id dan *login* dengan NPWP dan *password* perusahaan.
2. Setelah masuk kedalam halaman utama, *klik* “Bukti Pemotongan” >> “Pasal 23” >> “*Input* Bukti Potong 23”, dan akan muncul tampilan form untuk mengisi bukti potong PPh Pasal 23.
3. Untuk melakukan proses *input* bukti potong PPh Pasal 23 kedalam *E-Bupot*, terlebih dahulu memperoleh *file* berupa *softcopy* data rekapan *general ledger* yang telah dibuat oleh perusahaan, dan daftar keterangan *vendor* perusahaan .
Gambar berikut merupakan hasil rekapan *general ledger* dan daftar keterangan *vendor* perusahaan yang diberikan oleh pembimbing lapangan.

Gambar 3.12

Rekapan *General Ledger* Masa Juli dan Agustus 2020

PT. WAHYU ABADI							
General Ledger Detail							
From 01 Jul 2020 to 31 Agu 2020							
Filtered By : Account Name							
Date	source	SOURCE ID.	Vendor	tarif	DPP	PPH yang dipotong	Nama Akun
06 Jul 2020	Purchase Payment	CPI/KBP1-MBA1/20070610-15	ETOS INDONUSA, PT	2%	3.100.000	62.000,00	Hutang Pajak PPh 23
14 Jul 2020	Purchase Payment	BPI/MBA1/20071403-02	JASUTRA CIKARANG MOTOR, CV	4%	1.140.000	45.600,00	Hutang Pajak PPh 23
14 Jul 2020	Purchase Payment	BPI/MBA1/20071412-01	KARYA MITRA TENAGA HANDAL, PT	2%	6.500.000	174.925,00	Hutang Pajak PPh 23
14 Jul 2020	Purchase Payment	BPI/MBA1/20071412-04	KARYA MITRA TENAGA HANDAL, PT	2%	200.000	517.555,00	Hutang Pajak PPh 23
14 Jul 2020	Purchase Payment	BPI/MBA1/20071412-05	KARYA MITRA TENAGA HANDAL, PT	2%	200.000	49.288,00	Hutang Pajak PPh 23
14 Jul 2020	Purchase Payment	BPI/MBA1/20071412-02	KARYA MITRA TENAGA HANDAL, PT	2%	636.800	60.666,00	Hutang Pajak PPh 23
14 Jul 2020	Purchase Payment	BPI/MBA1/20071406-03	MAXINDO NETWORK, PT	2%	200.000	130.000,00	Hutang Pajak PPh 23
14 Jul 2020	Purchase Payment	BPI/MBA1/20071403-05-05	FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL, PT	2%	200.000	4.000,00	Hutang Pajak PPh 23

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan)

Gambar 3.13

Daftar Keterangan *Vendor* Perusahaan PT Wahyu Abadi

No.	Nama Vendor	Alamat	NPWP	Kode Objek Pajak
1	ETOS INDONUSA, PT	Jl. Daan Mogot 121 A RT 006/005 DURI KEPA, JAKARTA BARAT		24-104-35
2	MAXINDO NETWORK, PT	MARINA RAYA RUC BLOK II NO.77 BUKIT GOLF MEDITERRANIA PIK, KAMPAL MUIARA, JAKARTA UTARA		24-104-26
3	FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL, PT	Gedung South Quarter LT 12 Tower C Jalan Raden Ajeng Kartini kav 8		24-104-40
4	CAHAYA BARU MULIA, PT	JL.SUKAMULIA RAYA I NO.2 HARAPAN MULIA KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT		24-104-56
5	DASA PRIMA, PT	JL. MARGONDA RAYA NO. 393 RT 001 RW 008 DEPOK		24-104-54
6	AGUNG RAYA PT	Jl. Bangka No.1 Tanjung Priuk Jakarta Utara 14310		24-104-56
7	TRIJAYA WICAKSANA SENTOSA, PT	EJIP Industrial Park Plot 8D Cikarang selatan		24-104-29

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan)

Gambar 3.12 dan 3.13 merupakan sebagian rekapan *general ledger* dan daftar keterangan *vendor* perusahaan PT Wahyu Abadi.

4. Dalam proses meng-*input* bukti potong terdapat 4 tahapan. Tahap yang pertama adalah kolom identitas wajib pajak yang dipotong. Tahap kedua adalah dokumen dasar pemotongan. Tahap ketiga adalah pajak penghasilan yang dipotong, dan tahap yang terakhir adalah identitas pemotong pajak. Sebagai contoh, ingin menginput bukti potong PT Etos Indonusa masa Juli yang informasi data-datanya terdapat dalam Gambar 3.12 dan Gambar 3.13. Dalam penginputan pada tahapan pertama yaitu identitas wajib pajak, maka data yang digunakan adalah yang terdapat pada kotak berwarna merah yaitu NPWP, Alamat wajib pajak, dan tahun pajak dan masa pajak yang diinginkan. Gambar berikut adalah Hasil Penginputan Bukti Potong PPh 23 Tahap Pertama.

Gambar 3.14

**Hasil Penginputan Bukti Potong PPh 23 Tahap Pertama kedalam E-
*Bupot***

Perekaman Bukti Potong Baru

Identitas Wajib Pajak Yang Dipotong

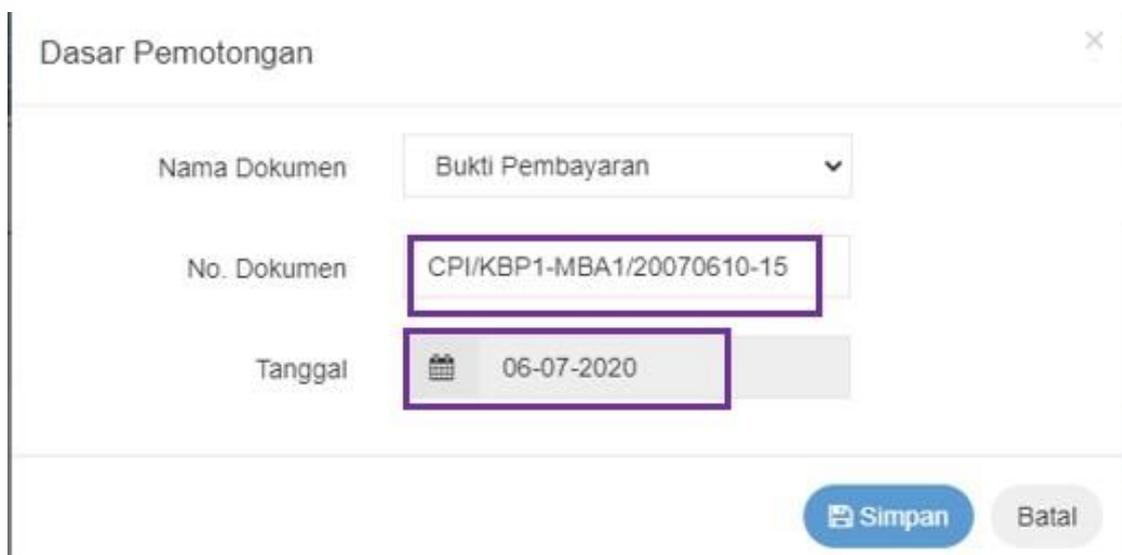
Tahun Pajak	2020	Masa Pajak	7
Identitas	<input checked="" type="radio"/> NPWP <input type="radio"/> NIK		
NPWP	<input type="text"/> <small>Apabila menggunakan NPWP Suami atau Istri</small>		
Nama	ETOS INDONUSA		
Alamat	JALAN DAAN MOGOT		
Kelurahan/Desa	DURI KEPA	Kecamatan	KEBON JERUK
Kota/Kabupaten	KOTA ADM. JAKARTA BARAT	Propinsi	DKI JAKARTA
Kode Pos	11510		

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan)

Kemudian pada tahap kedua adalah meng-*input* dokumen dokumen dasar pemotongan. Dalam tahap kedua ini membutuhkan data nomor dokumen dan tanggal pemotongan. Sebagai contoh untuk mengisi tahap kedua ini data yang dibutuhkan adalah data yang berada dalam kolom yang berwarna ungu pada Gambar 3.12 yaitu tanggal “06/07/2020” dan untuk nomor dokumen adalah “CPI/KBP1-MBA1/20070610-15”. Berikut adalah Gambar Hasil Penginputan Bukti Potong PPh 23 Tahap Kedua kedalam *E-Bupot*.

Gambar 3.15

Hasil Penginputan Bukti Potong PPh 23 Tahap Kedua Kedalam *E-Bupot*



The screenshot shows a web form titled "Dasar Pemotongan" with a close button (X) in the top right corner. The form contains three input fields:

- Nama Dokumen:** A dropdown menu with "Bukti Pembayaran" selected.
- No. Dokumen:** A text input field containing "CPI/KBP1-MBA1/20070610-15".
- Tanggal:** A date picker field showing "06-07-2020".

At the bottom right of the form, there are two buttons: "Simpan" (Save) and "Batal" (Cancel). The "No. Dokumen" and "Tanggal" fields are highlighted with a purple border.

(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Dari Gambar 3.15 nama dokumen yang dipilih adalah “Bukti Pembayaran” dan setelah meng-*input* nomor dokumen dan tanggal, *klik* “simpan”. Tahap ketiga untuk mengisi pajak penghasilan yang dipotong, membutuhkan data mengenai

Kode Objek Pajak, Jumlah Penghasilan Bruto (DPP), Tarif, dan Jumlah PPh yang dipotong. sebagai contoh untuk mengisi bagian ketiga ini menggunakan data yang terdapat pada Gambar 3.12 dan 3.13 yang berada dalam kotak berwarna hijau yaitu untuk kode objek pajak “24-104-26”, jumlah penghasilan bruto “Rp.3.100.000” dan PPh yang dipotong “Rp.62.000”. Gambar berikut merupakan Hasil Penginputan Bukti Potong PPh 23 Tahap Ketiga kedalam *E-Bupot*.

Gambar 3.16

Hasil Penginputan Bukti Potong PPh 23 Tahap Ketiga Kedalam *E-Bupot*

The screenshot displays a form titled "Pajak Penghasilan Yang Dipotong" with the following fields and values:

Field	Value
Kode Objek Pajak	24-104-35 Jasa pembasmian hama;
Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	3.100.000
Tarif (%)	2
PPh Yang Dipotong/DTP (Rp)	62.000

Additional details: A "hitung" button is located next to the tariff field. The text "Tanpa Fasilitas" is visible at the bottom of the form.

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan)

Dan pada tahap yang terakhir, adalah tahapan untuk mengisi identitas pemotong pajak. pada tahapan ini identitas pemotong pajak secara otomatis terisi dengan nama dan NPWP PT Wahyu Abadi, maka dalam tahapan ini hanya memilih

nama dan status seseorang yang akan menandatangani. Berikut merupakan gambar Hasil Penginputan Bukti Potong PPh 23 Tahap Keempat kedalam *E-Bupot*.

Gambar 3.17

Hasil Penginputan Bukti Potong PPh 23 Tahap Keempat kedalam *E-Bupot*

The screenshot displays a web form titled "Identitas Pemotong Pajak". It is divided into two main sections: "NPWP" and "Penandatangan".

- NPWP:** A text input field containing the number "01311142001000".
- Nama:** A text input field containing the name "WAHYU ABADI".
- Penandatangan:** A section for proxy information with two dropdown menus:
 - Bertindak sebagai:** A dropdown menu with "Kuasa" selected and circled in black.
 - Nama:** A dropdown menu with "ETJIN" selected and circled in black.
- Disclaimer:** A checkbox with a checkmark, circled in black, followed by the text: "Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas".
- Buttons:** At the bottom, there are two buttons: a blue "Simpan" button and a red "Batal" button.

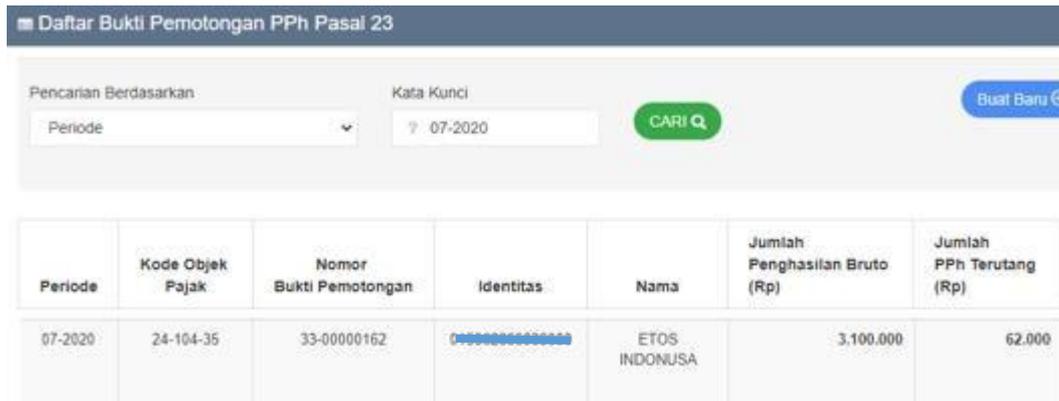
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan)

Dalam Gambar 3.16 ini kolom bertindak sebagai diisi dengan "Kuasa" dan pada kolom nama secara otomatis akan terisi nama seorang kuasa tersebut, dan juga memberikan tanda "✓" untuk menyetujui dan mengakui bahwa semua informasi telah di-input dengan benar, lengkap, dan jelas. Kemudian klik "Simpan". Sehingga secara otomatis data-data yang telah diinput akan tampil dalam daftar

bukti pemotongan PPh 23 dalam *E-Bupot*. Gambar berikut merupakan Hasil Akhir Penginputan Bukti Potong PPh 23 kedalam *E-Bupot*.

Gambar 3.18

Hasil Akhir Penginputan Bukti Pemotongan PPh 23 kedalam *E-Bupot*



Periode	Kode Objek Pajak	Nomor Bukti Pemotongan	Identitas	Nama	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah PPh Terutang (Rp)
07-2020	24-104-35	33-00000162	[REDACTED]	ETOS INDONUSA	3.100.000	62.000

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan)

Penginputan bukti pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan untuk Masa Juli dan Agustus 2020, dan jumlah bukti potong yang diinput kedalam *E-Bupot* sebanyak 107 bukti potong. Penginputan serupa juga dilakukan untuk bukti potong PPh pasal 23 lainnya.

3. Melakukan Rekap SPT Masa PPh Pasal 21

Rekapan PPh Pasal 21 PT Wahyu Abadi dilakukan untuk tahun pajak 2020 untuk perusahaan induk dan perusahaan cabang. Dalam merekap PPh Pasal 21, terlebih dahulu memperoleh file berupa *softcopy* format rekapan PPh 21 dari pembimbing lapangan dan SPT PPh Pasal 21 beserta dengan bukti pembayaran dan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Gambar berikut merupakan contoh format rekapan PPh Pasal 21 PT Wahyu Abadi.

Gambar 3.19

Format Rekapitan PPh Pasal 21 PT Wahyu Abadi

MASA	OBJEK PAJAK								OBJEK PAJAK FINAL		TOTAL		JUMLAH BAYAR	KODE PAJAK	TANGGAL BAYAR	NO NTPN	TANGGAL LAPOR	NOMOR BUKTI TERIMA
	PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP		KOMISARIS		BUKAN PEGAWAI		PESANGON									
	BRUTO	PPH	BRUTO	PPH	BRUTO	PPH	BRUTO	PPH	BRUTO	PPH	BRUTO	PPH						

(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Pada Gambar 3.17 terdapat kolom Masa, DPP dan PPh 21 untuk Objek pajak pegawai tetap, pegawai tidak tetap, komisaris, bukan pegawai, DPP dan PPh yang dipotong untuk Objek pajak final yaitu pesangon, Total seluruh DPP dan PPh 21, Jumlah yang dibayarkan, kode pajak, tanggal pembayaran/setor, no. NTPN, tanggal lapor, dan nomor bukti penerimaan. Dalam mengisi kolom-kolom format rekapitan PPh 21 tersebut, data yang digunakan berdasarkan informasi yang terdapat dalam SPT PPh Pasal 21 PT Wahyu Abadi. Berikut ini adalah contoh SPT PPh Pasal 21 Masa Maret 2020 PT Wahyu Abadi.

Gambar 3.20

SPT PPh Pasal 21 Masa Maret 2020 PT Wahyu Abadi (Perusahaan Induk)



**KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26**

Formulir ini digunakan untuk melaporkan
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau
Pasal 26

FORMULIR 1721

area barcode

MASA PAJAK : [mm - yyyy] #01 03 - 2020

Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini

SPT NORMAL SPT PEMBEHALAN KE- 1

JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DIBI OLEH PETUGAS)

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : 01.317.114.5 - 007 - 000

2. NAMA : PT WAHYU ABADI

3. ALAMAT : JL. Pulo Ayang Raya III S 15

4. NO. TELEPON : 0214610072 5. EMAIL : pwahyuabadi.pajak@wahyuabadi.co.id

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	20	876.053.310	159.896.132
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	38	89.190.438	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKES NAMBUNGAN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKES NAMBUNGAN	21-100-09	9	711.763.388	25.839.388
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	2	95.529.410	14.329.410
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUK B, TMTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEUATAN/PENERIMA PENSUN BERKALA SEBAGAI WABU PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		69	1.772.536.546	199.864.930

NPWP PEMOTONG: 01.317.114.5 - 007 - 000

C. OBJEK PAJAK FINAL

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA LIANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01	0	0	0
2.	PENERIMA LIANG MANFAAT PENSUN, TUNJANGAN HARI TUAKATAU JAMINAN HARI TUA DAN PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02	0	0	0
3.	PELAYAT NEGARA, PEGAWAI NE GERI SIPIL, ANGGOTA TNI POLRI DAN PENSUNAN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN BAYARAN LAIN YANG DIBERIKAN KEPADA KEJANGKARAN NEGARASADANINAH	21-402-01	0	0	0
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99	0	0	0
5.	JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 5)		0	0	0

(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Gambar 3.18 merupakan contoh SPT PPh Pasal 21 masa Maret PT Wahyu Abadi untuk perusahaan induk. Sebagai contoh, untuk mengisi kolom Masa “Maret”, mengisi kolom DPP dan PPh yang dipotong dapat dilihat dari Gambar 3.18 yang berada dalam kotak berwarna merah yaitu sebesar DPP “Rp.876.053.310” dan PPh Pegawai tetap “Rp159.696.132”. Sedangkan kolom Objek Pajak final pada Gambar 3.18 tidak ada nilainya, maka dalam format rekapan dikosongkan saja. Dan pada kolom total dihitung dengan menjumlahkan DPP dan PPh 21 pegawai tetap, pegawai tidak tetap, komisaris, dan bukan pegawai. Hasil tersebut harus sama jumlahnya dengan total yang terdapat pada SPT PPh 21 Perusahaan. Contoh dalam Gambar 3.18 jumlah DPP dan PPh 21 untuk masa Maret 2020 adalah Rp.1.772.536.546 dan Rp. 199.864.930.

Gambar 3.21

**Hasil Rekapan Sebagian PPh Pasal 21 Masa Maret 2020 PT Wahyu Abadi
(Perusahaan Induk)**

MASA	OBJEK PAJAK								OBJEK PAJAK FINAL		TOTAL	
	PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP		KOMISARIS		BUKAN PEGAWAI		PESANGON		BRUTO	PPH
	BRUTO	PPH	BRUTO	PPH	BRUTO	PPH	BRUTO	PPH	BRUTO	PPH		
MARET	876.053.310	159.696.132	89.190.438	-	215.594.297	51.430.297	711.763.388	25.839.388	-	-	1.772.536.546	199.864.930

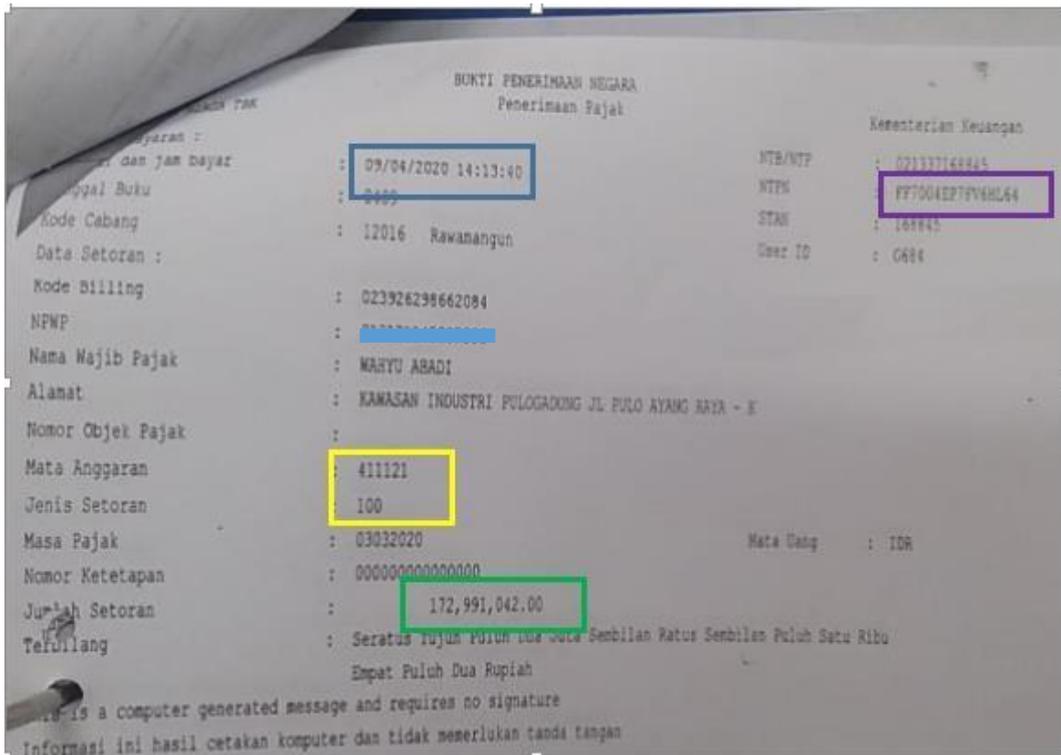
(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Gambar 3.19 merupakan hasil rekapan sebagian PPh Pasal 21. Kemudian untuk mengisi kolom jumlah bayar, kode pajak, tanggal bayar, NTPN, tanggal lapor, dan nomor bukti penerimaan, dapat dilihat dari bukti pembayaran dan

bukti penerimaan elektronik PT Wahyu Abadi. Berikut adalah lembar bukti pembayaran untuk PPh Pasal 21 Masa Maret 2020.

Gambar 3.22

Lembar Bukti Pembayaran Ke-1 PPh Pasal 21 Masa Maret 2020



(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Pada Gambar 3.20 merupakan lembar bukti pembayaran, pembayaran pajak dibedakan berdasarkan kode pajaknya/ jenis setoran pajaknya, maka dalam melakukan pembayaran dapat dilakukan dalam waktu yang berbeda. Contoh untuk membayar pajak PPh Pasal 21 Masa Maret ini, PT Wahyu Abadi melakukan tiga kali pembayaran, dan terdapat pembayaran pada hari yang berbeda. Berikut Contoh Lembar Bukti Pembayaran Ke-2 PPh Pasal 21 Masa 2020 PT Wahyu Abadi (Perusahaan Induk).

Gambar 3.23

Lembar Bukti Pembayaran Ke-2 PPh Pasal 21 Masa Maret 2020

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Pajak
Salinan BPN Asli
Kementerian Keuangan

Bank CIMB NIAGA TBK

Data Pembayaran :
Tanggal dan jam bayar : 13/04/2020 13:55:39
Tanggal Buku : 0414
Kode Cabang : 23037 CIMB BKS LIPPO CIKARANG
Data Setoran :
Kode Billing : 023926755545057
NPWP :
Nama Wajib Pajak : WAHYU ABADI
Alamat : KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG JL. PULO AYANG RAYA - K
Nomor Objek Pajak :
Mata Anggaran : 411121
Jenis Setoran : 100
Masa Pajak : 03032020
Mata Uang : IDR
Nomor Ketetapan : 00000000000000
Jumlah Setoran : 1,034,500.00
Terbilang : Satu Juta Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah

NTB/NTP : 021411790192
NTPN : 7E6C42LU7R81E7V1
STAN : 790392
User ID : I625

This is a computer generated message and requires no signature
Penerimaan ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Gambar 3.21 ini merupakan contoh lembar bukti pembayaran ke-2 untuk pembayaran PPh Pasal 21 Masa Maret 2020. Dengan tanggal pembayaran yang berbeda, jumlah yang berbeda, dan no. NTPN yang berbeda. Setelah mengisi kolom tanggal pembayaran, jumlah pembayaran, NTPN dan kode pajak, selanjutnya mengisi kolom tanggal lapor dan nomor bukti penerimaan. Untuk mengisi kolom tersebut dapat dilihat dari Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Berikut merupakan bukti penerimaan elektronik masa Maret 2020 PT Wahyu Abadi (perusahaan induk).

Gambar 3.26

Hasil Rekap PPh Pasal 21 Masa Januari-Juni 2020

MASA	OBJEK PAJAK						OBJEK PAJAK FINAL		TOTAL		JUMLAH BAYAR	KODE PAJAK	TANGGAL BAYAR	NO NTPN	TANGGAL LAPOR	NOMOR BUKTI TERIMA		
	PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP		KOMISARIS		BUKAN PEGAWAI		PESANGON									
	BRUTO	PPH	BRUTO	PPH	BRUTO	PPH	BRUTO	PPH	BRUTO	PPH								
JANUARI	797.036.126	121.137.796	36.780.934		85.821.340	4.291.067					919.638.400	125.428.863	125.428.863	411121/100	07/02/2020	ADF84741GK7P1F6	21/02/2020	21145206496201021301
										16.000.000	16.000.000			411121/401			21/02/2020	21145206496201021301
FEBRUARI	936.583.194	161.806.189	25.938.002		94.520.156	13.720.156	811.608.247	24.348.249			1.868.649.599	199.874.594	199.874.594	411121/100	10/03/2020	E69013IKKIGU860V	20/03/2020	90145306419201020211
										424.485.714	38.672.857	424.485.714	38.672.857	411121/401			20/03/2020	90145306419201020211
MARET	755.988.423	122.595.245	89.190.438		215.594.297	51.430.297	711.763.388	25.839.388			1.772.536.546	199.864.930	199.864.930	411121/100	09/04/2020	FF7004E7F7V6H164	20/04/2020	84145406463201020432
											25.839.388			411121/100	09/04/2020	37A492LU7QDQR2K8	20/04/2020	84145406463201020432
											1.034.300			411121/100	13/04/2020	7E6C42LU7R81E1V1	20/04/2020	84145406463201020432
APRIL	853.581.415	136.450.242	156.148.915				589.546.433	17.686.393			1.599.276.763	154.136.635	154.136.635	411121/100	08/05/2020	1887A4EPA6G962F4	20/05/2020	85145506402201020231
											17.686.392			411121/100	08/05/2020	978540T386DAU427	20/05/2020	85145506402201020231
											2.392.812			411121/100	20/05/2020	85145506402201020231	20/05/2020	85145506402201020231
MEI	1.958.644.564	445.962.396	90.314.993		415.232.784	85.395.284	396.020.670	11.880.620			2.860.213.011	543.238.300	543.238.300	411121/100	10/06/2020	C87804EPOH9ECS5E5	19/06/2020	70145806422201019521
											526.731.801			411121/100	10/06/2020	36224318TM1L16M5P	19/06/2020	70145806422201019521
											4.625.879			411121/100	19/06/2020	70145806422201019521	19/06/2020	70145806422201019521
										293.697.059	19.054.559	293.697.059	19.054.559	411121/401	10/06/2020	749654EPOH7E20V1	19/06/2020	70145806422201019521
JUNI	827.183.765	117.426.097	297.692.981		108.266.666	27.066.666	537.848.484	16.135.484			1.770.992.896	160.628.247	160.628.247	411121/100	10/07/2020	F06682LUGT36U7K8	17/07/2020	04145706493201017221
											16.135.484			411121/100	10/07/2020	848484EPIG17IOBQR	17/07/2020	04145706493201017221
										498.235.294	49.735.294	498.235.294	49.735.294	411121/401	10/07/2020	C31890T3HTV85P58	17/07/2020	04145706493201017221

(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Pengisian serupa juga dilakukan untuk masa-masa yang lainnya dan untuk perusahaan cabang. Secara keseluruhan merekap SPT PPh Pasal 21 untuk Perusahaan Induk dan Perusahaan Cabang PT Wahyu Abadi periode tahun pajak 2020. Hasil rekap PPh Pasal 21 yang telah dibuat, disimpan dan selanjutnya diserahkan kepada pembimbing lapangan untuk di-review.

4. Melakukan Rekap SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)

Rekap PPh 4 ayat (2) PT Wahyu Abadi dilakukan untuk tahun pajak 2019 dan 2020. Dalam merekap PPh 4 ayat (2), terlebih dahulu memperoleh file berupa softcopy format rekap PPh 4 ayat (2), softcopy format rekap bukti potong PPh 4 ayat (2) , Bukti potong PPh 4 ayat (2), SPT, Bukti Pembayaran, dan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Sebelum melakukan proses rekap PPh Pasal 4 ayat (2) dilakukan dahulu merekap bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2). Gambar berikut

merupakan contoh format rekapan bukti potong PPh 4 ayat (2) yang diperoleh dari pembimbing lapangan.

Gambar 3.27

Format Rekapan Bukti Potong PPh 4 ayat (2) PT Wahyu Abadi

MASA	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN		NILAI OBJEK PAJAK	PPH YANG DIPOTONG/DIPUNGUT (Rp)
			NOMOR	TANGGAL		

(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Gambar 3.24 merupakan format rekapan bukti potong PPh 4 ayat (2). Untuk mengisi kolom-kolom tersebut membutuhkan dokumen bukti pemotongan PPh 4 ayat (2) wajib pajak yang dipotong. Berikut merupakan contoh gambar bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Januari 2020.

Gambar 3.28

Bukti Pemotongan PPh 4 ayat (2) Masa Januari 2020

BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
 ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH
 DAN/ATAU BANGUNAN

Nomor : 000001/PPH(2)-WA/2018

NPWP : 01-317-114-S-997-099
 Nama : PT WAHYU ABADI
 Alamat : JL. SANUR ELOK NO 33 KELAPA GA
 Lokasi Tanah dan atau Bangunan : CIKARANG

Jumlah Bruto Nilai Sewa (Rp)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong (Rp)
10.401.111	10,00	1.040.111

Terbilang : Satu Jula Empat Puluh Ribu Seratus Sebelas Rupaiah

DKI JAKARTA, 07 Januari 2020

NPWP : 01-317-114-S-997-099
 Nama : PT WAHYU ABADI

(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Untuk mengisi kolom nama, NPWP, nomor bukti pemotongan, tanggal pemotongan, nilai objek pajak, dan PPh yang dipotong dapat dilihat dari dokumen Bukti Pemotongan PPh 4 ayat (2) seperti contoh Gambar 3.25. sebagai contoh, untuk mengisi kolom nama dapat dilihat dari Gambar 3.25 yang berada dalam kotak berwarna merah yaitu “Wisni Setyawati Wahyudi” , nomor bukti potong dapat dilihat dalam kotak yang berwarna hijau yaitu “000001/PPH4(2)/WA/I/2018”, tanggal pemotongan berada dalam kotak berwarna kuning yaitu tanggal “07/01/2020”, nilai objek pajak dapat dilihat dalam kotak berwarna hitam yaitu sebesar “Rp.10.401.111”, dan yang terakhir PPh yang dipotong dapat dilihat dari data yang berada dalam kolom berwarna ungu sebesar “1.040.111”. Berikut merupakan Hasil rekapan bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2) untuk tahun 2020.

Gambar 3.29

Hasil Rekapan Bukti Potong PPh 4 ayat (2) 2020

MASA	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN		NILAI OBJEK PAJAK	PPH YANG DIPOTONG/DIPUNGUT (Rp)
			NOMOR	TANGGAL		
JANUARI		WISNI SETYAWATI WAHYUDI	000001/PPH4(2)-WA/I/2018	07/01/2020	10.401.111	1.040.111
FEBRUARI		WISNI SETYAWATI WAHYUDI	000002/PPH4(2)-WA/II/2020	20/02/2020	10.401.111	1.040.111
MARET		WISNI SETYAWATI WAHYUDI	000003/PPH4(2)-WA/III/2020	10/03/2020	10.401.111	1.040.111
APRIL		WISNI SETYAWATI WAHYUDI	000004/PPH4(2)-WA/IV/2020	09/04/2020	10.401.111	1.040.111
MEI		WISNI SETYAWATI WAHYUDI	000005/PPH4(2)-WA/V/2020	19/05/2020	10.401.111	1.040.111
JUNI		WISNI SETYAWATI WAHYUDI	000006/PPH4(2)-WA/VI/2020	09/06/2020	10.401.111	1.040.111

(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Setelah melakukan rekap bukti potong PPh 4 ayat (2), selanjutnya dilakukan rekap untuk PPh 4 ayat 2. Sebelumnya pembimbing lapangan sudah memberikan

softcopy format rekapan PPh 4 ayat (2). Berikut merupakan gambar format rekapan PPh 4 ayat (2) yang diberikan oleh pembimbing lapangan.

Gambar 3.30

Format Rekapan PPh 4 ayat (2) PT Wahyu Abadi

MASA	PERSEWAAN TANAH / BANGUNAN		TOTAL		JUMLAH Bayar	KODE PAJAK	TANGGAL BAYAR	NO NTPN	TANGGAL LAPOR	NOMOR BUKTI PENERIMAAN
	BRUTO	PPH	BRUTO	PPH						

(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Dalam format rekapan tersebut terdapat kolom DPP dan PPh dari persewaan tanah/bangunan, jumlah DPP dan PPh keseluruhan, jumlah yang dibayarkan, kode pajak, NTPN, tanggal lapor, dan nomor bukti penerimaan. Untuk mengisi kolom Masa, DPP dan PPh persewaan tanah/bangunan, dan total dari DPP dan PPh keseluruhan dilihat dari dokumen SPT PPh 4 ayat (2) milik perusahaan. Berikut adalah contoh SPT PPh 4 ayat (2) Masa Januari 2020 PT Wahyu Abadi.

Gambar 3.31

SPT PPh 4 ayat (2) Masa Januari 2020

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2).

Masa Pajak: 01 / 2020

ENTITAS PEMOTONG PAJAK/WALIB PAJAK

Nama WP: P T WAHYU ABADI

Alamat: JL PULO AYANG RAYA BLOK 111 B/15

Uraian (1)	KAPKJS (2)	Nilai Objek Pajak (Rp.) (3)	Tarif (%) (4)	PPh yang Dipotong/Dipungut/Cisestar Bendah (Rp) (5)
1. Bunga Deposito/Tabunggan, Diskonto Sbi dan Jasa Girs				
a. Bunga Deposito/Tabunggan	411128/404			
1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri	411128/404			
2) Yang ditempatkan di Luar Negeri	411128/404			
b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	411128/404			
c. Jasa Girs	411128/404			
2. Transaksi Perputan Saham				
a. Saham Pendiri	411128/407			
b. Bukan Saham Pendiri	411128/406			
3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara				
Hasil dan	411128/401			
Hasil dan	411128/405			
Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	411128/403	10.401.111	0,50	1.040.111
a. Persewa sebagai Pemotong Pajak	411128/403			
b. Orang Pribadi/badan yang Menyewakan Sendiri PPh				
6. Jasa Konstruksi				
a. Perencana Konstruksi	411128/408			
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/408			
2) Penyedia Jasa yang Menyewakan Sendiri PPh				
b. Pelaksana Konstruksi	411128/409			
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyewakan Sendiri PPh				
c. Pengawas Konstruksi	411128/409			
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyewakan Sendiri PPh				
7. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan	411128/402			
8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi	411128/417			
9. Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Dipegangkan di Bursa	411128/418			
10. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	411128/419			
Penghasilan Tertentu Lainnya				
a.				
b.				
c.				
JUMLAH		10.401.111		1.040.111

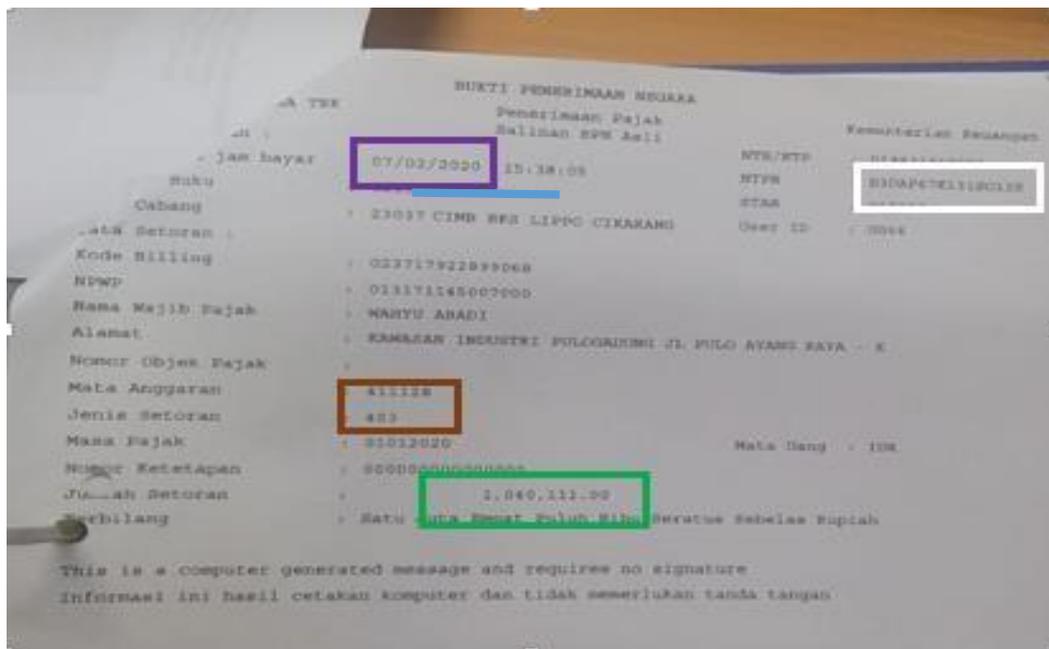
(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Pada Gambar 3.28 merupakan contoh SPT PPh 4 ayat (2) PT Wahyu Abadi. Untuk mengisi kolom Masa dapat dilihat pada Gambar 3.28 yang berada dalam kotak berwarna kuning yaitu masa “Januari”, untuk mengisi kolom DPP dan PPh dapat dilihat dalam kolom berwarna merah yaitu sebesar “Rp10.401.111” untuk DPP dan “Rp.1.040.111” untuk PPh yang dipotong, sedangkan untuk total keseluruhan DPP dan PPh dapat dilihat dalam kolom berwarna biru yaitu sebesar “Rp.10.401.111” untuk DPP dan “Rp.1.040.111” untuk PPh yang dipotong.

PT Wahyu abadi hanya memiliki satu objek pajak yang dipotong PPh 4 ayat (2) yaitu, persewaan tanah/bangunan. Selanjutnya untuk mengisi kolom Jumlah yang dibayarkan, Kode Pajak, Tanggal Pembayaran dan NTPN maka dokumen yang dibutuhkan adalah bukti pembayaran. Dalam dokumen bukti pembayaran tersebut dapat mengisi kolom-kolom yang dibutuhkan untuk merekap PPh 4 ayat (2). Berikut merupakan contoh dokumen bukti pembayaran PPh 4 ayat (2) Masa Januari 2020.

Gambar 3.32

Bukti Pembayaran PPh 4 ayat (2) Masa Januari 2020



(Sumber: Dokumen Perusahaan)

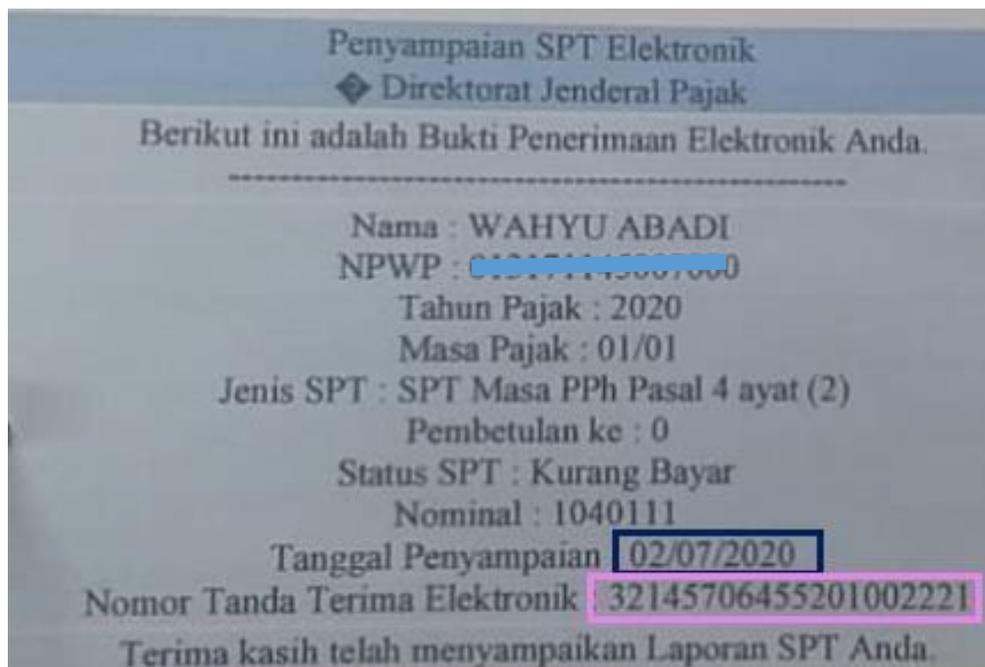
Pada Gambar 3.29 merupakan bukti pembayaran PPh 4 ayat (2) Masa Januari 2020. Untuk mengisi kolom jumlah yang dibayarkan, tanggal pembayaran, kode pajak, dan NTPN dapat dilihat dari Gambar 3.29. Keterangan dalam kotak berwarna ungu untuk mengisi tanggal pembayaran yaitu tanggal “07/02/2020”, keterangan dalam kotak berwarna hijau untuk mengisi kolom jumlah yang

dibayarkan yaitu sebesar “Rp.1.040.111”, keterangan dalam kotak berwarna putih untuk mengisi kolom NTPN yaitu “B3DAF67K131SO138”, dan keterangan dalam kotak berwarna coklat untuk mengisi kolom kode pajak yaitu “411128/403”.

Selanjutnya untuk mengisi kolom tanggal lapor dan nomor bukti penerimaan, dokumen yang dibutuhkan adalah Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Berikut merupakan contoh gambar bukti penerimaan elektronik PT Wahyu Abadi Masa Januari 2020.

Gambar 3.33

Bukti Penerimaan Elektronik PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Januari 2020



(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Gambar 3.30 merupakan contoh bukti penerimaan elektronik untuk masa Januari 2020. Dalam dokumen bukti penerimaan elektronik terdapat keterangan mengenai tanggal lapor dan juga nomor bukti penerimaan. Sebagai contoh untuk mengisi kolom tanggal laporan dan nomor bukti penerimaan dapat melihat

Gambar 3.30. keterangan yang terdapat dalam kotak berwarna biru tua untuk mengisi kolom tanggal lapor yaitu tanggal “02/07/2020”, dan pada keterangan yang berwarna dalam kotak berwarna pink digunakan untuk mengisi kolom nomor bukti penerimaan yaitu “32145706455201002221”. Setelah semua kolom format rekapan PPh 4 ayat (2) sudah terisi semua maka rekapan untuk PPh 4 ayat (2) telah selesai. Berikut merupakan hasil rekapan PPh 4 ayat 2 PT Wahyu Abadi periode 2020.

Gambar 3.34
Hasil Rekapan PPh 4 ayat (2) PT Wahyu Abadi Periode 2020

REKAP SPT PPh PASAL 4 AYAT 2											
TAHUN 2020											
MASA	PERSEWAAN TANAH / BANGUNAN		TOTAL		JUMLAH BIAYA	SELISIH PPH 4 AYAT 2	KODE DAJAK	TANGGAL BAYAR	NO NTPN	TANGGAL LAPOR	NOMOR BUKTI LAPOR
	BRUTO	PPH	BRUTO	PPH							
JANUARI	10.401.111	1.040.111	10.401.111	1.040.111	1.040.111	-	411128/403	07/02/2020	83DAF67K13150135	02/07/2020	32145706455201000000
FEBRUARI	10.401.111	1.040.111	10.401.111	1.040.111	1.040.111	-	411128/403	10/03/2020	881215B6K9GTINAL	20/03/2020	63145706486201002811
MARET	10.401.111	1.040.111	10.401.111	1.040.111	1.040.111	-	411128/403	09/04/2020	04E060T385LKTUVS	20/04/2020	21145406448201020451
APRIL	10.401.111	1.040.111	10.401.111	1.040.111	1.040.111	-	411128/403	08/05/2020	43B155B6QB8P2U5	20/05/2020	14145506486201020750
MEI	10.401.111	1.040.111	10.401.111	1.040.111	1.040.111	-	411128/403	10/06/2020	E0CC50T3E6VRHDSV	19/06/2020	90145606458201019621
JUNI	10.401.111	1.040.111	10.401.111	1.040.111	1.040.111	-	411128/403	10/07/2020	BFE783ICONLBUETJ	17/07/2020	34145706467201017431

(Sumber: Dokumen Perusahaan)

5. Menjurnal dan Memberikan Kode Akun dalam Nota Bukti Pengeluaran

Kas

Melakukan kegiatan menjurnal dan memberikan kode akun diperlukan untuk mengetahui jenis suatu transaksi. Tugas yang diberikan oleh pembimbing lapangan adalah menjurnal dan memberikan kode dalam nota bukti pengeluaran kas khusus untuk kode akun “15.1” dengan nama jurnal adalah “biaya bensin *sales/marketing*”. Tugas ini dilakukan setiap hari dengan jumlah yang tidak

menentu, sesuai dengan transaksi yang terjadi pada hari tersebut. berikut merupakan langkah-langkah untuk menjurnal dan memberikan kode akun dalam nota pengeluaran kas.

1. Menerima *voucher* pengeluaran beserta dengan bukti pembelian dari *purchasing department*.
2. Melakukan pengecekan dan perhitungan kembali pada bukti pembelian, agar tidak terjadi salah hitung antara yang terdapat di bukti pembelian dan *voucher* pengeluaran. Berikut merupakan bukti pembelian.

Gambar 3.35

Bukti Pembelian



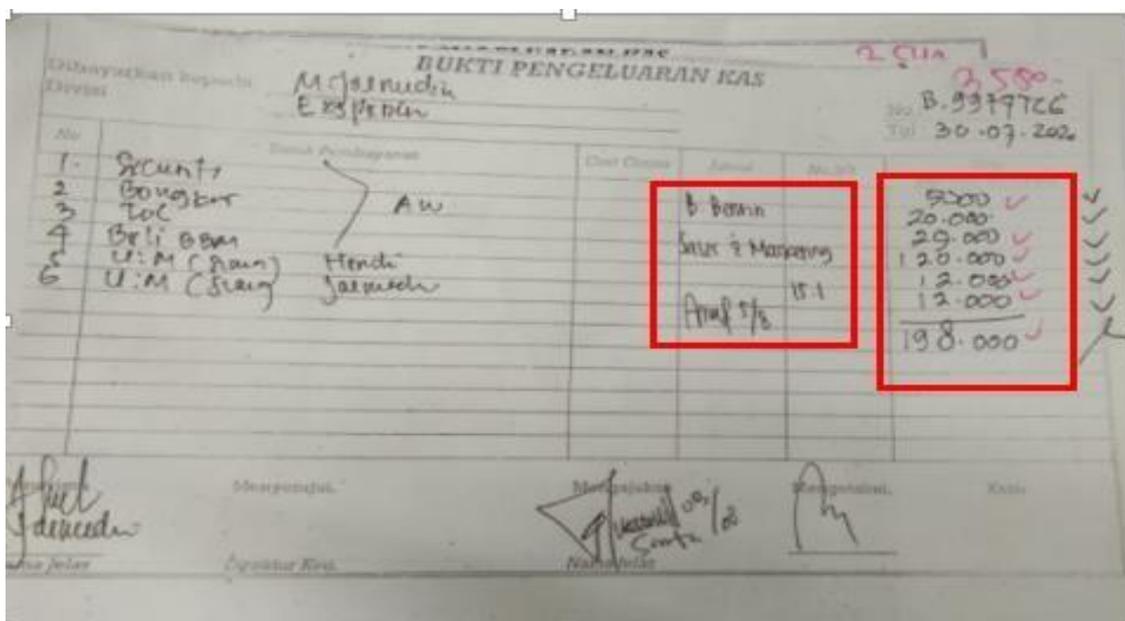
(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Pada Gambar 3.32 merupakan contoh bukti pembelian/ pengeluaran kas yang dilakukan PT Wahyu Abadi, dalam kotak berwarna merah merupakan bukti-bukti transaksi yang dilakukan, yaitu pengeluaran untuk pembelian BBM adalah Rp.120.000, pengeluaran untuk pembayaran tol adalah Rp.29.000, pengeluaran untuk bongkar muat adalah Rp.20.000, pengeluaran untuk *tip security* adalah Rp.5.000, dan pengeluaran untuk uang makan *driver* adalah Rp.24.000 sehingga jika dijumlahkan totalnya adalah Rp.198.000. total nilai tersebut harus sama dengan yang terdapat pada *voucher* pengeluaran kas. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara yang terdapat dalam bukti pembelian dan *voucher* pengeluaran kas, maka tidak dapat diberikan jurnal dan pemberian kode akun. Dokumen tersebut dikembalikan kembali pada *purchasing department* untuk dilakukan pengecekan kembali.

3. Jika sudah tidak ada kesalahan, maka selanjutnya akan dijurnal dan diberikan kode akun pada lembar *voucher* pengeluaran kas tersebut. Berikut merupakan contoh *voucher* pengeluaran kas.

Gambar 3.36

Voucher Pengeluaran Kas



(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Pada Gambar 3.33 merupakan contoh *voucher* pengeluaran kas, pada *voucher* pengeluaran kas tersebut sudah terisi keterangan bentuk pembayaran digunakan untuk apa saja, dan juga rincian masing-masing pembayaran. Total yang terdapat dalam Gambar 3.33 adalah Rp.198.000, yang jumlahnya sama dengan bukti-bukti pembelian yang sudah dilakukan pengecekan tadi. Setelah melihat jumlah total pengeluarannya sesuai, maka selanjutnya diberikan jurnal dan kode akun seperti yang tertera pada kotak merah di atas, yaitu “Biaya Sales & Marketing” dan kode akun adalah “15.1” kode tersebut merupakan kode yang diberikan perusahaan untuk jenis transaksi biaya *sales and marketing*, dan setelah itu juga diberikan paraf dibawahnya.

4. Kemudian setelah menjurnal dan melakukan pemberian kode akun, dokumen tersebut diberikan kepada pembimbing lapangan, yang nantinya akan diserahkan kepada atasan untuk ditandatangani.

6. Merekap Pertanggungjawaban Uang Muka Vendor PT S

Merekap pertanggungjawaban uang muka PT S dilakukan untuk beberapa nomor *purchase order* yang berbeda. Dalam tugas ini merekap sebanyak tujuh pertanggungjawaban uang muka dengan nomor *purchase order* yang berbeda. Dalam satu *purchase order* terdapat beberapa jenis uang muka, dan dalam satu jenis uang muka terdapat beberapa *invoice* yang berbeda. Langkah-langkah yang dilakukan untuk merekap pertanggungjawaban uang muka adalah:

1. Menerima dokumen kuitansi-kuitansi atau *invoice* berupa pertanggungjawaban bon sementara atas uang muka, dan *softcopy* format rekapan. Berikut merupakan contoh format rekapan untuk merekap pertanggungjawaban uang muka.

Gambar 3.37

Format Rekapan Pertanggungjawaban Uang Muka (contoh: untuk nomor PO S/20/00730)

PERTANGGUNGJAWABAN UANG MUKA					
SUBARMA					
S/20/00730					
NOMOR JENIS UANG MUKA	NOMINAL	NO INVOICE	JUMLAH PJUM	TANGGAL	KETERANGAN

(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Dalam Gambar 3.34 merupakan contoh format rekapan untuk nomor *purchase order* “S/20/00730”.

2. Untuk mengisi kolom-kolom yang terdapat dalam Gambar 3.34 maka diperlukan dokumen kuitansi-kuitansi pertanggungjawaban bon sementara atas uang muka. Berikut merupakan contoh pertanggungjawaban bon sementara atas uang muka.

Gambar 3.38

Pertanggungjawaban Bon Sementara atas Uang Muka

PERTANGGUNG JAWABAN BON SEMENTARA			
Nama Karyawan :	Novyana		
Bagian/ Divisi :	Purchasing		
Pengambilan uang muka dengan Bon Sementara No:			
Tanggal :	23-Jun-20	Sejumlah :	Rp. 470,243,800
			061/UM-IDR/V/2020
Rincian pengeluaran dan lampiran bukti-buktnya :			TOTAL
			470,243,804.00
FT SUPARMA T			
S/20/00730	(PRIS KE-1)		
010.002-20.10523480		Rp	277,581,201.00
010.002-20.10523478		Rp	95,968,123.00
010.002-20.10523477		Rp	95,968,123.00

(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Pada Gambar 3.38 merupakan contoh lembar pertanggungjawaban bon sementara atas uang muka dengan nomor *purchase order* adalah “S/20/00730”. Untuk mengisi kolom nomor jenis uang muka dapat dilihat dalam Gambar 3.38 yang terdapat dalam kotak berwarna biru, yaitu “061/UM-IDR/V/2020”. Untuk kolom nominal data yang diambil adalah sebesar “Rp.470.243.804” atau dapat dilihat dari data yang terdapat dalam kotak berwarna hijau. Sedangkan untuk mengisi kolom nomor *invoice* data yang diambil adalah yang terdapat dalam kotak berwarna hitam yang berisikan data “010.002-20.10523480”, “010.002-20.10523478”, dan “010.002-20.10523477”. Pada kolom jumlah pertanggungjawaban uang muka (PJUM) diambil dari data yang terdapat dalam kotak berwarna ungu yang berisikan data “Rp.277.583.201”, “Rp.95.968.123”, dan “Rp. 95.968.123”.

3. Selanjutnya untuk mengisi kolom tanggal dan juga keterangan diambil dari dokumen yang sama. Berikut merupakan Gambar untuk tanggal dan keterangan lembar pertanggungjawaban bon sementara atas uang muka (nomor PO S/20/00730)

Gambar 3.39

Tanggal Pada Lembar Pertanggungjawaban Bon Sementara (nomor PO
S/20/00730)

Jumlah yang dikeluarkan		Rp. 689.519,447
Jumlah kekurangan/ kelebihan		Rp. 724.357,00 (belum full)
Dipertanggungjawabkan oleh :		Dibertujut
Nama		Atasan Langsung Ybs
Tgl. 26-06-2020		Tgl. 26-06-2020
Dikerjakan oleh Kasir :		Finance
Penerimaan kasibahan uang		Tgl.
Diterima Oleh :		
(Tdt Kasir & Nama)		Tgl.
Kasir		
Ansip		

(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Dalam Gambar 3.39 untuk mengisi kolom tanggal dapat dilihat dari kotak berwarna kuning yang berisikan tanggal “26-Juni-2020”. Dalam *purchase order* “S/20/00730” terdapat beberapa jenis uang muka, dan untuk merekap pertanggungjawaban uang muka menggunakan langkah yang serupa, begitu pula untuk nomor *purchase order* lainnya.

4. Setelah itu dilakukan penjumlahan untuk kolom nominal dan kolom jumlah PJUM, untuk melihat perbandingan jumlah antara pencadangan uang muka yang dianggarkan dan uang muka yang sudah dipertanggungjawabkan atau biaya aktual atau sebenarnya yang telah dikeluarkan. Dari hasil perbandingan jumlah tersebut dapat dilihat apakah perusahaan masih terdapat kekurangan, kelebihan atau sudah sesuai terhadap pencadangan uang muka tersebut. Berikut merupakan Gambar

jumlah PJUM “061/UM-IDR/V/2020” untuk *purchase order* “S/20/00730”.

Gambar 3.40

Jumlah PJUM “061/UM-IDR/V/2020” (No.PO S/20/00730)

Jumlah yang dikeluarkan	Rp. 469,519,447
Jumlah kekurangan/ kelebihan	Rp. 724,357.00 (lebih full)

(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Dalam Gambar 3.40 merupakan jumlah PJUM untuk jenis uang muka “061/UM-IDR/V/2020” dengan nomor PO “S/20/00730” sebesar Rp. 469.519.447, dan pada kasus ini nilai nominal pencadangan uang muka jumlahnya lebih besar daripada yang dipertanggungjawabkan atau yang aktual, sehingga terdapat kelebihan pencadangan uang muka sebesar Rp.724.357. Dan berikut merupakan gambar hasil rekapan pertanggungjawaban uang muka keseluruhan untuk No.PO “S/20/00730”.

Gambar 3.41

Hasil Rekapan Pertanggungjawaban Uang Muka (No. PO S/20/00730)

PERTANGGUNGJAWABAN UANG MUKA					
S/20/00730					
NOMOR PURCHASE ORDER	NOMINAL	NO INVOICE	JUMLAH PJUM	TANGGAL	KETERANGAN
061/UM-IDR/V/2020	470.243.804	010.002-20.10523480	277.583.201	26/06/2020	
		010.002-20.10523478	95.968.123	26/06/2020	
		010.002-20.10523477	95.968.123	26/06/2020	
	470.243.804		469.519.447		724.357 LEBIH BAYAR (BELUM FULL)
063/UM-IDR/V/2020	52.958.707	010.002-20.10530734	41.185.295	01/07/2020	
		010.002-20.10534300	12.022.561	06/07/2020	
	52.958.707		53.207.856		- 249.149 KURANG BAYAR
064/UM-IDR/V/2020	183.395.872	010.002-20.10530733	83.318.177	01/07/2020	
		010.002-20.10527005	76.854.709	01/07/2020	
		010.002-20.10527006	23.056.412	01/07/2020	
		010.002-20.10528880	5.443.875	09/07/2020	
	183.395.872		188.673.173		- 5.277.301 KURANG BAYAR
					- 4.802.093 (KURANG BAYAR)

3.3.2 Kendala yang Ditemukan

Terdapat beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan kerja magang yaitu:

1. Saat melakukan rekap PPh Pasal 23 dan bukti potong PPh Pasal 23 dari *website E-Bupot* adalah *server* sering mengalami *error/down*.
2. Dalam meng-*input* bukti potong PPh Pasal 23 ke dalam *website E-Bupot* kendala yang dihadapi adalah ketidaklengkapan data mengenai keterangan *vendor/customer*, seperti tidak ada NPWP, alamat tidak ada.
3. Dalam merekap PPh 21 kendala yang dihadapi adalah terdapat dokumen dalam bentuk fotokopi yang tulisannya kurang jelas sehingga angka dalam dokumen tersebut sulit untuk diketahui.

3.3.3 Solusi untuk Kendala yang Ditemukan

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul yaitu:

1. Menunggu beberapa saat, dan mencoba melakukan *re-login*. Jika masih terjadi *server yang error* dalam waktu yang lumayan lama, maka mengerjakan tugas yang lain dahulu agar waktu tidak terbuang begitu saja.
2. Menanyakan langsung kepada pembimbing lapangan atas data-data yang masih belum lengkap, dan meminta kembali daftar keterangan *vendor/customer* yang benar-benar sudah *ter-update*.
3. Untuk dokumen yang kurang jelas tulisannya, maka dilakukan pengecekan langsung terhadap dokumen asli yang dapat diminta melalui pembimbing lapangan.